

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AUDIT DELAY PADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

ARIS MULADI
NIM. 12030112150010

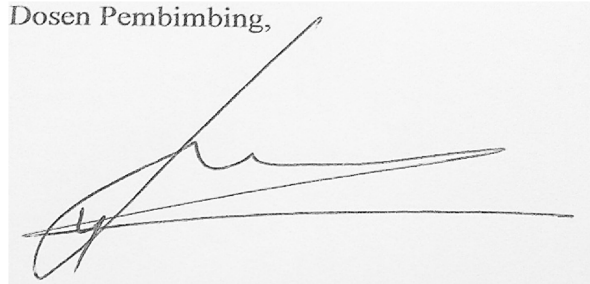
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Aris Muladi
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112150010
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AUDIT DELAY PADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**
Dosen Pembimbing : Drs. H. Sudarno, M.Si, Ph.D, Akt.

Semarang, 15 Agustus 2014

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink on a light gray background. The signature is stylized and appears to be 'H. Sudarno'.

(Drs. H. Sudarno, M.Si., Ph.D, Akt.)

NIP. 19650520 199001 1001

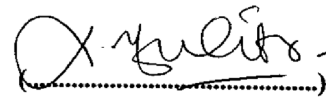
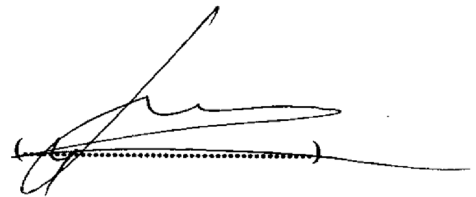
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Aris Muladi
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112150010
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 22 Agustus 2014

Tim Penguji

1. Drs. Sudarno, M.Si., Ph.D, Akt
2. Dr. Indira Januarti, M.Si., Akt
3. Agung Juliarto, M.Si.,Ph.D, Akt



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **Aris Muladi**, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 15 Agustus 2014

Yang Membuat Pernyataan,



Aris Muladi

NIM. 12030112150010

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun anggaran 2010. Faktor-faktor yang diteliti berupa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), ukuran pemerintah daerah, pengalaman pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, tingkat ketergantungan pemerintah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat, terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya, jumlah temuan audit dan opini audit. Ukuran pemerintah daerah diproksikan dengan total realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun berjalan, Standar Akuntansi Pemerintah yang digunakan adalah Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, opini audit yang diteliti adalah opini selain opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampel acak berstrata secara proporsional dan diperoleh sampel sebanyak 217 pemerintah kabupaten/kota. Data yang dipakai adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota tahun anggaran 2010 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Guna membuktikan hipotesis, maka dilakukan pengujian regresi *Ordinary Least Squares* yang diawali dengan uji asumsi klasik.

Pengujian secara statistik atas hipotesis menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah, pengalaman pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, jumlah temuan audit dan jenis opini audit berpengaruh signifikan terhadap lamanya *audit delay*. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pengalaman pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah terbukti berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Jumlah temuan audit dan jenis opini audit terbukti berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Kata kunci: *Audit delay*, Teknologi Informasi, pemerintah daerah, Standar Akuntansi Pemerintah.

ABSTRACT

The purpose of this research is analyzing the factors that affect the length of audit delay in the districts/cities in Indonesia in the 2010 budget year that examined factors such as the use of Regional Financial Information System software, the size of local government, local government experience in implementing the Government Accounting Standards, the level of dependency on the government's financial assistance from the central government, the re-election of regional heads, the number of audit findings and audit opinion. The size of the local government is proxied by the total actual revenue and expenditure in the current year, the Government Accounting Standards used were appropriate Government Accounting Standards by Government Regulation No. 24 of 2005, the observed audit opinion is audit opinion other than unqualified opinion.

Sampling method used is proportional stratified random sampling and obtained 217 districts/cities as sample. The data used are secondary data, namely the financial statements of districts/cities 2010 fiscal year that have been audited by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia. To prove the hypothesis, performed Ordinary Least squares testing that begins with the test of classical assumption.

Statistically testing for hypothesis concluded that the use of Regional Financial Information System applications, the government's experience in implementing the Government Accounting Standards, the number of audit findings and the type of audit opinion significantly influence the duration of audit delay. The use of Regional Financial Information System software and experience of local government in implementing the Government Accounting Standards proved to negatively affect audit delay. The number of audit findings and the type of audit opinion proven positive effect on audit delay.

Keywords: Audit delay, Information Technology, local government, the Government Accounting Standards

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya serta ilmu yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi pada Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kekurangan dan tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. M. Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Drs. Sudarno, M.Si., Ph.D., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Indira Januarti, M.Si., Akt dan Bapak Agung Juliarto, M.Si., Ph.D, Akt selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan perbaikan kepada penulis.

5. Bapak Adityawarman, S.E., M.Acc., Ak. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis selama perkuliahan.
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sekretaris Jenderal BPK, dan seluruh jajarannya terutama Biro Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah memberikan kesempatan dan beasiswa kuliah kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Diponegoro.
7. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Keluarga Penulis: Istri tercinta, Intan Permatasari dan putri tersayang Hilmiya Yasmine Aira., yang menjadi inspirasi dan penyemangat penulis serta selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menempuh pendidikan. Kedua pasangan orang tua penulis, Tukiran (Bapak) dan Sumarni (Ibu) serta H. Didi Kurdi Salkasaputra (Bapak mertua) dan Hj. Cicih Mintarsih (Ibu mertua) yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menempuh pendidikan.
9. Rekan-rekan penulis di kelas kerjasama BPK-Kemenkeu-UNDIP yang telah memberikan semangat dalam menempuh pendidikan.
10. Rekan sebangunan dengan Bapak Sudarno: Mas Arief Kurniawan, Sigit Wira Pratama, dan Martalina Kalincayo Purba yang telah memberikan banyak masukan dan saran terhadap skripsi ini.

11. Rekan indekos: Alif Zain Muttaqin dan Shohib Abror yang telah menjadi teman diskusi selama menyusun skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Semarang, 15 Agustus 2014

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by several loops and a horizontal line extending to the right.

Aris Muladi

NIM. 12030112150010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA	9
2.1 Dampak Teknologi Informasi Terhadap Sistem Akuntansi...	9
2.2 Teori Kelembagaan.....	10
2.3 Laporan Keuangan.....	11
2.4 Audit Keuangan Daerah.....	14
2.5 Audit Delay.....	15
2.6 Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah...	15
2.7 Ukuran Pemerintah Daerah.....	17
2.8 Pengalaman Pemerintah Menerapkan SAP.....	17
2.9 Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Keuangan Pemerintah Pusat.....	18
2.10 Terpilihnya Kembali Kepala Daerah periode sebelumnya (Petahana/ <i>Incumbent</i>).....	18

2.11 Jumlah Temuan Audit.....	19
2.12 Opini Audit.....	20
2.13 Penelitian Terdahulu.....	20
2.14 Kerangka Pemikiran.....	21
2.15 Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	28
3.2 Populasi dan Sampel	30
3.3 Jenis dan Sumber Data	30
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.5 Metode Analisis	31
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	36
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	36
4.2 Analisis Data	37
4.3 Pembahasan	53
BAB V PENUTUP.....	60
5.1 Simpulan	60
5.2 Keterbatasan	62
5.3 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Sumber data masing-masing Variabel penelitian	30
Tabel 4.1 Profil Objek Penelitian Berdasarkan Jenis Pemerintah Daerah.	37
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	38
Tabel 4.3 Tabulasi silang (<i>crosstab</i>) Audit delay-SIKD.....	40
Tabel 4.4 Tabulasi silang (<i>crosstab</i>) Audit delay-APBD.....	41
Tabel 4.5 Tabulasi silang (<i>crosstab</i>) Audit delay-Pengalaman	42
Tabel 4.6 Tabulasi silang (<i>crosstab</i>) Audit delay-RasioPTP	43
Tabel 4.7 Tabulasi silang (<i>crosstab</i>) Audit delay-Petahana	45
Tabel 4.8 Tabulasi silang (<i>crosstab</i>) Audit delay-Temuan audit	46
Tabel 4.9 Tabulasi silang (<i>crosstab</i>) Audit delay-opini audit.....	47
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Kolmogorov-Smirnov	48
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Multikolinieritas	49
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas	50
Tabel 4.13 Hasil Regresi OLS	51
Tabel 4.14 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Model Penelitian	20

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	66
LAMPIRAN 2 Output EViews atas Pengujian Asumsi Klasik.....	69
LAMPIRAN 3 Output Regresi OLS EViews 6.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan harus dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan. Menurut Ghozali dan Chariri (2007), karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terdiri dari relevan, keandalan, daya banding dan konsistensi, pertimbangan *cost-benefit*, dan materialitas. Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu (*predictive value*) dan dapat menegaskan atau memperbaiki harapan yang yang dibuat sebelumnya (*feedback value*). Selain itu, agar relevan, informasi harus disajikan tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan/kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil (*timeliness*).

Untuk memenuhi ketepatan waktu laporan keuangan, manajer dan auditor diharapkan dapat meminimalkan *audit delay* (Johnson, 1998). *Audit delay* merujuk pada perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan (Subekti dan Widiyanti, 2004). Menurut Leventis dan Weetman (2004), *audit delay* merujuk pada waktu dari akhir tahun fiskal entitas sampai tanggal laporan audit. Senada dengan Leventis, Aryati dan Theresia (2005) menyebutkan *audit delay* sebagai rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan

perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.

Menurut Mohamad (2012), pemerintah daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka disajikan secara tepat waktu karena laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh publik untuk mengevaluasi kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Pada sektor pemerintah, ketepatan waktu laporan keuangan berperan penting dalam rangka pengambilan keputusan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD adalah 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 31 ayat 1). Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) semester II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2010, 2011, dan 2012 diketahui pada tahun 2010, terdapat 148 (33,5%) pemerintah kabupaten/kota yang terlambat menyampaikan laporan keuangan keuangannya. Pada tahun 2011 jumlahnya meningkat menjadi 158 (32,2%) pemerintah kabupaten/kota dan pada tahun 2012 sebanyak 92 (18,5%) pemerintah kabupaten/kota laporan keuangannya terlambat. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah pemerintah kabupaten/kota yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya, akan tetapi secara persentase terjadi penurunan. Penurunan persentase tersebut disebabkan karena adanya penambahan pemerintah kabupaten/kota sebagai akibat adanya pemekaran provinsi baru.

Carslaw dan Kaplan (1991) menjelaskan bahwa *audit delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang

dibutuhkan untuk melaksanakan audit tersebut. Kapan dimulainya audit tergantung kapan laporan keuangan diserahkan kepada auditor. Sehingga lamanya waktu perusahaan menyampaikan laporan keuangan kepada auditor dapat mempengaruhi lamanya *audit delay*. Sedangkan menurut Payne dan Jensen (2002), lamanya *audit delay* dipengaruhi oleh dua hal yaitu karakteristik audit dan karakteristik auditor. Karakteristik audit yang dimaksud terdiri dari insentif (penghargaan) kepada pemerintah daerah atas laporan keuangan yang tepat waktu, lingkungan audit, dan karakteristik dari pemerintah daerah seperti ukuran pemerintah daerah, kompleksitas audit dan opini audit. Sedangkan karakteristik auditor terdiri dari keahlian auditor, pengalaman auditor, dan jumlah tenaga auditor pada kantor akuntan publik. Selain itu, menurut Cohen dan Leventis (2012), *audit delay* pada pemerintah kota dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor politik, yaitu kekuatan oposisi dan keterpilihan kembali kepala daerah, keberadaan tim akuntan internal, jumlah temuan audit, ukuran pemerintah daerah, dan populasi penduduk.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sandra Cohen dan Sergio Leventis (2012). Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap faktor penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang saat ini sedang marak digunakan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Pada penelitian terdahulu belum ada yang meneliti dampak penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan terhadap *audit delay*. Aplikasi SIKD merupakan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangannya sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat efektif dan efisien dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat tepat waktu dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi SIKD diharapkan dapat

mengurangi *audit delay* sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat disampaikan secara tepat waktu.

Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota. Faktor-faktor tersebut yaitu ukuran pemerintah daerah, pengalaman pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat, terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya (petahana), jumlah temuan audit, dan opini audit yang diberikan oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar kecenderungan untuk memiliki transaksi keuangan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah daerah yang berukuran kecil. Banyaknya transaksi keuangan akan menyebabkan pengelolaan keuangan bertambah rumit sehingga penyusunan laporan keuangan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal tersebut akan menyebabkan penyampaian laporan keuangan kepada auditor menjadi lebih lama dan akan menambah *audit delay*.

Pengalaman pemerintah daerah dalam menerapkan SAP dapat mengurangi *audit delay*. Pengalaman pemerintah daerah dalam menerapkan SAP dapat diartikan sebagai pengalaman pegawai pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan. Dengan pengalamannya, pegawai pemerintah daerah akan menjadi mahir dalam menyusun laporan keuangan sehingga waktu untuk menyusun laporan keuangan akan menjadi lebih cepat dan *audit delay* dapat berkurang.

Pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat akan berusaha untuk tunduk dan patuh terhadap

peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, termasuk peraturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut didasarkan pada kekhawatiran pemerintah daerah akan sanksi yang akan didapat apabila melanggar peraturan tersebut. Dengan demikian, tingkat ketergantungan pemerintah daerah atas bantuan keuangan dari pemerintah pusat yang tinggi dapat mengurangi *audit delay*.

Di Indonesia, periode masa jabatan seorang kepala daerah yaitu selama 5 tahun. Kepala daerah yang terpilih kembali memimpin daerah pada periode kedua memiliki pengalaman dalam pemerintahan termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan dan audit atas laporan keuangan tersebut. Dengan pengalaman tersebut, kepala daerah diharapkan dapat mengambil kebijakan terkait penyusunan laporan keuangan sehingga *audit delay* dapat berkurang.

Temuan audit merupakan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas standar dan atau peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Sebelum ditetapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, temuan audit akan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk memperoleh tanggapan/klarifikasi atas temuan tersebut. Jumlah temuan audit yang banyak akan menambah waktu pemerintah daerah dalam memberikan tanggapan sehingga penyelesaian laporan audit menjadi lebih lama dan *audit delay* akan bertambah.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan capaian tertinggi dalam penerapan standar akuntansi dan pengelolaan keuangan. Mendapatkan opini WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cita-cita kepala daerah di seluruh Indonesia. Mendapatkan opini WTP adalah sebuah prestasi bagi seorang kepala daerah. Dapat diartikan pula, opini WTP

merupakan kabar gembira bagi pemerintah daerah sehingga selayaknya untuk disampaikan sesegera mungkin kepada masyarakat. Demikian sebaliknya, opini audit selain opini WTP dapat diartikan sebagai kabar buruk bagi pemerintah daerah dan tidak selayaknya untuk disampaikan sesegera mungkin sehingga LHP BPK menjadi terlambat. Sehingga dapat diartikan opini audit selain opini WTP akan menambah *audit delay*.

1.2 Rumusan Masalah

Aplikasi SIKD merupakan aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang digunakan oleh beberapa pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Aplikasi SIKD merupakan aplikasi yang terintegrasi secara online antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga diharapkan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat lebih cepat selesai dan tepat waktu dan audit BPK dapat segera dilaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan umum pada penelitian ini adalah “apakah aplikasi SIKD dan faktor-faktor lainnya berpengaruh terhadap *audit delay*?”. Secara khusus, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran kualitas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah dan gambaran berapa lama tingkat *audit delay* yang terjadi?
2. Sejauh mana penggunaan aplikasi SIKD berpengaruh pada *audit delay*?
3. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor berupa ukuran pemerintah daerah, pengalaman pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, terpilihnya kembali kepala daerah periode sebelumnya, jumlah temuan audit, dan opini audit terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah yaitu untuk mengetahui apakah penggunaan aplikasi SIKD dan faktor-faktor lainnya menyebabkan lamanya *audit delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Auditor BPK: dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga dapat mengoptimalkan kinerjanya.
2. Bagi akademisi: memberi deskripsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada instansi pemerintah, sehingga dapat dijadikan tambahan wawasan dalam penelitian berikutnya.
3. Bagi Pemerintah Daerah: dapat memberikan pedoman dalam penyusunan LKPD yang dapat mempersingkat waktu penyerahan LKPD kepada BPK RI, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mencermati faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay* sehingga penyampaian laporan keuangan dapat tepat waktu.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab 1 ini terdiri dari latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Menguraikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu berkaitan dengan topik/masalah yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran yang melandasi timbulnya hipotesis penelitian. Di dalam kerangka pemikiran tersebut dijelaskan juga mengenai variabel bebas dan variabel terikat dari penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi deskripsi tentang variabel-variabel dalam penelitian secara operasional, penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas. Setelah semua uji terpenuhi, baru dilakukan uji hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang simpulan dari penelitian yang menjawab seluruh pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Dampak Teknologi Informasi Terhadap Sistem Akuntansi

Sebagian besar entitas, termasuk perusahaan keluarga berukuran kecil, mengandalkan Teknologi Informasi (TI) untuk mencatat dan memproses transaksi bisnis. Akibat kemajuan TI yang luar biasa, perusahaan yang relatif kecilpun bahkan menggunakan komputer pribadi dengan perangkat lunak akuntansi komersial untuk menjalankan fungsi akuntansinya. Fungsi Akuntansi yang menggunakan jaringan TI yang rumit, internet, dan fungsi TI terpusat sekarang sudah merupakan hal yang umum (Arens, 2011).

Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan pengendalian internal. Menurut Arens (2011), beberapa perubahan dalam pengendalian internal yang disebabkan oleh integrasi TI ke dalam sistem akuntansi yaitu:

1. Pengendalian internal menggantikan pengendalian manual.

Keunggulan yang paling tampak dalam TI adalah kemampuan untuk menangani transaksi bisnis yang kompleks dalam jumlah yang besar dengan efisien. Karena komputer memproses informasi secara konsisten, sistem TI dapat mengurangi salah saji dengan mengganti prosedur yang biasanya dilakukan secara manual dengan pengendalian-pengendalian yang terprogram yang menerapkan fungsi saling mengawasi dan mengontrol (*check and balance*) untuk setiap transaksi yang diproses.

2. Menyediakan informasi dengan kualitas yang lebih tinggi.

Aktivitas-aktivitas TI yang kompleks biasanya diatur secara efektif karena kompleksitas mengharuskan adanya pengaturan, prosedur, dan dokumentasi

yang efektif. Hal tersebut biasanya menghasilkan informasi yang kualitasnya lebih tinggi serta lebih cepat bagi manajemen perusahaan. Jika manajemen yakin bahwa informasi yang dihasilkan oleh TI tersebut dapat diandalkan, manajemen akan menggunakan informasi tersebut untuk keputusan-keputusan manajemen yang lebih baik.

2.2 Teori Kelembagaan

Kelembagaan berasal dari kata dasar lembaga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lembaga berarti pola perilaku manusia yg mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yg relevan. Menurut Scott (2008), lembaga (*institution*) terdiri dari unsur kultural kognitif, norma, dan regulasi yang terkait secara bersama-sama dalam aktivitas dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna kehidupan sosial. Menurut Syahyuti (2011), manusia (baik secara individu atau organisasi) berperilaku secara regulatif maksudnya manusia akan berusaha memaksimalkan keuntungan untuk dirinya dengan menggunakan atau berkelit dari aturan-aturan (regulasi) yang ada. Manusia berperilaku secara normatif maksudnya bahwa perilaku manusia ditentukan oleh norma yang hidup di masyarakat. Manusia berperilaku dengan kultural kognitif memiliki maksud bahwa manusia memaknai segala hal disekitarnya termasuk regulasi dan norma, namun ia tidak langsung patuh sepenuhnya. Manusia memaknai lagi regulasi dan norma yang ada, kemudian memilih sikap dan perilakunya sendiri.

Pemerintah pusat telah menyusun peraturan-peraturan yang mengatur batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD dan pemerintah pusat. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

pemerintah daerah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terkait hal tersebut, perilaku pemerintah daerah sebagai sebuah organisasi juga tidak lepas dari ketiga unsur tersebut di atas. Perilaku pemerintah daerah yang berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dapat didasarkan pada unsur regulatif, normatif dan/atau kultural kognitif. Pemerintah daerah dapat berperilaku secara regulatif untuk menyampaikan laporan secara tepat waktu demi mendapatkan keuntungan baginya yaitu berupa terhindarnya dari sanksi yang diberikan apabila melanggar regulasi yang ada. Pemerintah daerah dapat berperilaku secara normatif untuk menyampaikan laporan secara tepat waktu karena hal itu merupakan suatu keharusan baginya. Pemerintah daerah dapat berperilaku secara kultural kognitif untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang dianggap benar.

2.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk memenuhi tujuannya, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebutkan empat karakteristik kualitatif pokok dalam laporan keuangan pemerintah (PP 24 tahun 2005), yaitu:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan yaitu:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
3. Tepat waktu
4. Lengkap

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau

penyajianya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan dengan kandungan informasi dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan mempunyai daya banding. Karakteristik relevan di sini berarti laporan tersebut mampu mendeskripsikan kondisi keuangan

perusahaan secara tepat waktu. Termaktub dalam SAP (2005), bahwa penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan akan berakibat pada hilangnya relevansi laporan keuangan.

2.4 Audit Keuangan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang dimaksud dengan Pemeriksaan (Audit) adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit yang dilaksanakan oleh BPK terdiri atas audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu.

Audit keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini

merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*).

2.5 Audit Delay

Menurut Carslaw dan Kaplan (1991), *Audit delay* didefinisikan sebagai periode antara akhir tahun buku perusahaan dengan tanggal laporan audit diterbitkan. Senada dengan Carslaw dan Kaplan, Payne dan Jensen (2002) menyebutkan *audit delay* sebagai waktu antara akhir tahun buku pemerintah daerah dengan penyelesaian laporan audit keuangan. *Audit delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit tersebut (Carslaw & Kaplan, 1991). Kapan dimulainya audit keuangan oleh BPK tergantung pada kapan laporan keuangan diserahkan oleh pemerintah daerah terkait kepada BPK. Sehingga semakin lama pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK, maka *audit delay* semakin panjang.

2.6 Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah

Menurut McLelland dan Giroux (2000), kota yang memiliki inovasi di bidang Teknologi Informasi akan memiliki waktu pelaporan yang lebih singkat.

Pada saat ini, pemerintah daerah di Indonesia menggunakan aplikasi sistem informasi keuangan daerah. Pada pemerintah daerah, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah akan mempermudah pegawai pemerintah dalam mengelola transaksi keuangan pemerintah daerah. Sebagai akibatnya, penyusunan laporan keuangan akan menjadi lebih cepat sehingga *audit delay* akan berkurang dan laporan keuangan dapat lebih tepat waktu.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, diketahui terdapat 3 jenis aplikasi SIKD yang digunakan oleh beberapa pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, yaitu:

1. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Aplikasi SIPKD merupakan aplikasi dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. Aplikasi ini memberikan manfaat kepada pemerintah daerah berupa kemudahan dalam pengadministrasian pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuan dari pengembangan aplikasi SIMDA adalah untuk mendukung peningkatan tingkat opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Aplikasi yang dibangun oleh pihak ketiga yang disewa oleh Pemda
Belum semua pemerintah daerah menggunakan aplikasi SIPKD ataupun SIMDA. Beberapa pemerintah daerah membangun aplikasi sistem informasi keuangan sendiri dengan menyewa perusahaan penyedia jasa pembuatan aplikasi. Sama halnya dengan aplikasi SIPKD dan SIMDA, penggunaan aplikasi tersebut bertujuan untuk memudahkan Pemda dalam pengadministrasian pengelolaan keuangan daerah.

2.7 Ukuran Pemerintah Daerah

Apabila diinterpretasikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit pada perusahaan manufaktur, terdapat faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit salah satunya yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini dapat dilihat dari beberapa proksi diantaranya total aset dan total pendapatan. Hal ini dapat dihubungkan dengan instansi pemerintah. Ukuran pemerintah dapat dilihat dari jumlah APBD. Semakin besar APBD maka dapat diasumsikan bahwa semakin besar pula pemerintah tersebut. Menurut Payne dan Jensen (2002), ukuran kota yang besar akan mengalami *audit delay* yang lebih lama. Hal itu terkait dengan meningkatnya jumlah transaksi keuangan pada kota tersebut. Apabila dikaitkan dengan ukuran pemerintah, maka pemerintah dengan APBD besar akan menyebabkan *audit delay* semakin lama.

2.8 Pengalaman Pemerintah Menerapkan SAP

Pengalaman pemerintah dalam menerbitkan laporan keuangan akan memberikan efek positif terhadap kepatuhan pemerintah terhadap SAP (Ryan, Stanley, dan Nelson, 2002). Menurut Owusu-Ansah (2002), organisasi

(pemerintah) yang terus menerapkan SAP, menyebabkan pegawai pemerintah daerah (akuntan internal) belajar lebih banyak mengenai masalah yang menyebabkan lamanya *audit delay*. Sedangkan Christiaens dan Peteghem (2007) menjelaskan pemerintah yang sudah berpengalaman banyak dalam menerbitkan laporan keuangan akan menjadi ahli dalam menangani masalah laporan keuangan.

2.9 Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat

Dalam rangka pemerataan pembangunan nasional, pemerintah pusat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah setiap tahun berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan DAU dan DAK oleh Pemerintah daerah telah diatur oleh pemerintah pusat. Menurut Cohen dan Leventis (2013), pemerintah daerah yang tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut dimotivasi adanya sanksi kepada pemerintah daerah berupa penundaan pemberian bantuan apabila pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada Pemerintah Pusat. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dan *audit delay* akan berkurang.

2.10 Terpilihnya kembali Kepala daerah periode sebelumnya (Petahana/*Incumbent*)

Di Indonesia jarang ada kepala daerah yang berasal dari kaum profesional. Menurut Cohen dan Leventis (2013), kepala pemerintah daerah

yang telah berpengalaman memimpin suatu daerah selama lebih dari empat tahun, maka dia akan cukup akrab dengan standar dan prosedur akuntansi serta langkah-langkah persiapan yang diperlukan untuk memfasilitasi prosedur audit. Kepala daerah petahana/*incumbent* yang terpilih kembali diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan dengan kepala daerah yang baru terpilih. Dengan pengalaman dan pengetahuan tersebut, kepala daerah petahana diharapkan dapat membuat kebijakan yang mengarah pada perbaikan dalam prosedur akuntansi. Dengan demikian, terpilihnya kembali kepala daerah petahana/*incumbent* diharapkan akan mempercepat penyelesaian penyusunan laporan keuangan sehingga *audit delay* akan berkurang.

2.11 Jumlah Temuan Audit

Hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK berupa opini dan temuan audit. Temuan audit adalah permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh auditor di lapangan. Jumlah temuan audit berpengaruh pada lamanya penyelesaian laporan audit. Menurut Cohen dan Leventis (2013) komunikasi antara auditan dengan auditor menjadi lebih intens dan menjadi lebih lama ketika terdapat permasalahan akuntansi. Permasalahan akuntansi yang dimaksud adalah temuan audit yang material. Banyaknya temuan audit akan menambah waktu diskusi temuan baik di internal BPK antara tim audit lapangan dengan penanggung jawab audit maupun diskusi temuan dengan pemerintah daerah selaku auditan sebelum temuan tersebut layak untuk diangkat dalam laporan hasil audit. Selain itu, banyaknya temuan audit akan menambah waktu bagi auditan dalam memberikan tanggapan atas temuan tersebut.

2.12 Opini Audit

Selain temuan audit, hasil audit BPK atas laporan keuangan adalah opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah ada empat jenis yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Menurut McLelland dan Giroux (2000), opini WTP (*unqualified opinion*) merupakan sebuah kabar bagus yang harus dilaporkan sesegera mungkin. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dianalogikan bahwa opini selain opini WTP (yaitu opini WDP, TW, dan TMP) adalah sebuah kabar buruk yang sebaiknya tidak dilaporkan. Selain itu, menurut Payne dan Jensen (2002), opini WDP mengindikasikan adanya tambahan prosedur yang dibutuhkan selama pelaksanaan audit yang akan meningkatkan *audit delay*.

2.13 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Cohen dan Leventis dalam *Effects of Municipal, auditing and political factors on audit delay* (2013). Cohen dan Leventis meneliti hubungan antara *audit delay* dengan 9 (sembilan) variabel bebas, meliputi pengalaman pemerintah dalam akuntansi akrual, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat, lokasi wilayah, adanya oposisi yang kuat, terpilihnya kembali walikota lama, adanya akuntan eksternal, adanya akuntan internal, jumlah temuan audit, tipe auditor dan 5 (lima) variabel kontrol meliputi ukuran aset pemerintah, jumlah penduduk, likuiditas, leverage, dan profitabilitas. Cohen dan Leventis menggunakan sampel sebanyak 116 kota di Yunani dengan data selama tahun

2006-2007. Hasil penelitian Cohen dan Leventis menunjukkan rata-rata *audit delay* selama 228 hari. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa *audit delay* memiliki hubungan yang signifikan dengan beberapa variabel saja yaitu adanya oposisi yang kuat, terpilihnya kembali walikota lama, adanya akuntan internal, jumlah penduduk, jumlah temuan dan ukuran aset pemerintah. Variabel penelitian yang lainnya tidak signifikan terhadap *audit delay*.

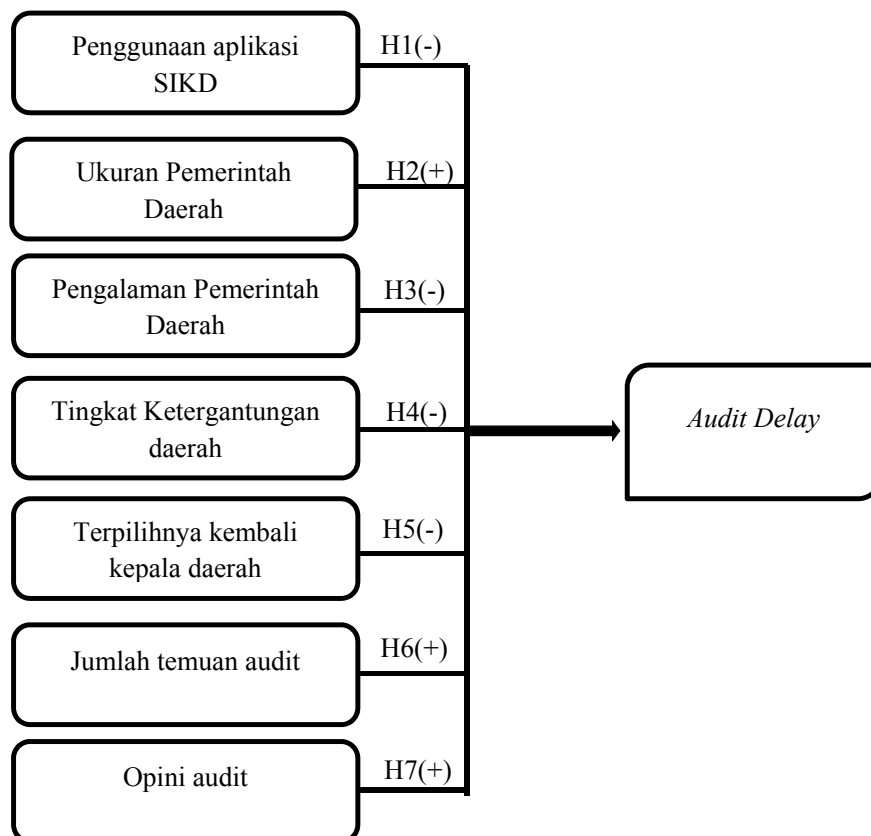
Penelitian lainnya dilakukan oleh Andrew J. McLelland dan Gary Giroux pada tahun 2000 di Amerika Serikat dalam *An empirical analysis of auditor report timing by large municipalities*, Jeff L. Payne dan Kevan L. Jensen pada tahun 2002 di Amerika Serikat dalam *An examination of municipal audit delay* dan penelitian oleh Marziana Mohamad, dkk pada tahun 2012 di Malaysia dalam *Audit delay in Local Authorities: An Explanatory Study in Kedah, Perak and Kelantan*. Sedangkan untuk di Indonesia, peneliti belum menemukan penelitian mengenai *audit delay* di sektor pemerintahan. Penelitian *audit delay* sebelumnya lebih banyak dilakukan pada sektor swasta, yaitu pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada lampiran.

2.14 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan PP No. 65 tahun 2010, lamanya *audit delay* akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, yang mana akan merugikan pemerintah daerah apabila pemerintah daerah tidak tepat waktu (terlambat) menyampaikan laporan keuangannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dengan variabel bebas berupa penggunaan aplikasi SIKD, ukuran Pemerintah daerah yang diproksikan dengan besarnya APBD pemerintah daerah, pengalaman pemerintah daerah dalam menerapkan SAP, tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, terpilihnya kembali kepala daerah periode sebelumnya, banyaknya temuan audit, dan opini audit. Hubungan antar variabel akan diperlihatkan dalam model penelitian pada Gambar 1.

Gambar 1
Model Penelitian



2.15 Hipotesis

2.15.1. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

McLelland dan Giroux (2000) menyatakan bahwa kota yang memiliki inovasi di bidang Teknologi Informasi akan memiliki waktu pelaporan yang lebih singkat. Hasil penelitian McLelland dan Giroux (2000) menyebutkan penggunaan teknologi informasi berpengaruh negative terhadap *audit delay*. Penggunaan aplikasi SIKD yang terintegrasi akan mempermudah administrasi dan pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah sehingga penyusunan laporan keuangan akan lebih cepat dan *audit delay* dapat berkurang.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang akan diuji adalah:

H1: Penggunaan aplikasi SIKD berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.15.2. Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut Payne dan Jensen (2002), ukuran kota yang besar akan mengalami *audit delay* yang lebih lama. Hal itu terkait dengan meningkatnya jumlah transaksi keuangan pada kota tersebut. Hasil penelitian Payne dan Jensen (2002) menyebutkan ukuran kota berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Apabila dikaitkan dengan ukuran pemerintah, maka pemerintah dengan APBD besar akan menyebabkan *audit delay* semakin lama. Pemerintah daerah yang memiliki APBD besar memiliki transaksi keuangan lebih banyak dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki APBD lebih kecil. Dengan transaksi keuangan yang lebih banyak, diperlukan waktu dalam pengadministrasian dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang akan diuji adalah:

H2: Ukuran Pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

2.15.3. Pengalaman Pemerintah menerapkan SAP

Menurut Owusu dan Ansah (2000), organisasi (pemerintah) yang terus menerapkan SAP akan berdampak kepada keahlian pegawai pemerintah daerah (akuntan internal). Pegawai pemerintah daerah akan belajar lebih banyak mengenai masalah yang menyebabkan lamanya *audit delay*. Sedangkan Christiaens dan Peteghem (2007) menjelaskan bahwa pemerintah yang memiliki banyak pengalaman dalam menerbitkan laporan keuangan akan menjadi mahir dalam menangani masalah laporan keuangan. Hasil penelitian Cohen dan Leventis (2013) menyebutkan pengalaman pemerintah dalam menerapkan akuntansi akrual tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Pegawai pemerintah daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan akuntansi yang berpengalaman diaudit akan belajar mengenai permasalahan-permasalahan pada pengelolaan keuangan sehingga pegawai tersebut akan menjadi tahu bagaimana apabila menemukan permasalahan yang sama dikemudian hari. Hal itu akan membuat penyusunan laporan lebih cepat dan akan mengurangi *audit delay*.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang akan diuji adalah:

H3: Pengalaman pemerintah dalam menerapkan SAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.15.4. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat

Menurut Cohen dan Leventis (2013), semakin tinggi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah semakin tunduk untuk mematuhi peraturan Pemerintah Pusat. Sebagai akibatnya, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dan akan mengurangi *audit delay*. Hal tersebut dimotivasi adanya sanksi kepada Pemerintah Daerah berupa penundaan pemberian bantuan apabila Pemerintah Daerah terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada Pemerintah Pusat. Hasil penelitian Cohen dan Leventis (2013) menyebutkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang akan diuji adalah:

H4: Tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.15.5. Terpilihnya Kembali Kepala Daerah Periode Sebelumnya

Menurut Cohen dan Leventis (2013), ketika kepala pemerintah daerah memegang posisi yang sama selama lebih dari empat tahun, maka dia akan cukup akrab dengan standar dan prosedur akuntansi serta langkah-langkah persiapan yang diperlukan untuk memfasilitasi prosedur audit. Hasil penelitian Cohen dan Leventis menyebutkan terpilihnya kembali walikota periode sebelumnya berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Kepala daerah periode sebelumnya (*petahana/incumbent*) yang terpilih kembali diharapkan memiliki

informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan kepala daerah yang baru terpilih, yang mengarah pada perbaikan dalam prosedur akuntansi. Selain itu, terpilihnya kembali kepala daerah petahana/*incumbent* diharapkan akan mempercepat penyelesaian penyusunan laporan keuangan dan mengurangi *audit delay*.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang akan diuji adalah:

H5: terpilihnya kembali kepala daerah periode sebelumnya berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.15.6. Jumlah Temuan Audit

Menurut Cohen dan Leventis (2013), ketika permasalahan akuntansi timbul, negosiasi antara auditan dengan auditor menjadi lebih intens dan berlangsung lama. Hasil penelitian Cohen dan Leventis (2013) menyebutkan banyaknya temuan audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Banyaknya temuan audit akan menambah waktu diskusi temuan baik dalam internal BPK antara tim audit lapangan dengan penanggung jawab audit maupun diskusi temuan dengan pemerintah daerah selaku auditan sebelum temuan tersebut layak untuk diangkat dalam laporan hasil audit. Selain itu, banyaknya temuan audit akan menambah waktu bagi auditan dalam memberikan tanggapan atas temuan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang akan diuji adalah:

H6: jumlah temuan audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

2.15.7. Opini Audit

Menurut McLellan dan Giroux (2000), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) merupakan sebuah pertanda kabar buruk bagi pengguna

laporan keuangan. Hasil penelitian Payne dan Jensen (2000) menyebutkan opini wajar dengan pengecualian berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah berupa opini non WTP (yaitu WDP, TW, atau TMP) dapat dianggap sebuah catatan buruk kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang akan diuji adalah:

H7: opini atas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang menjadi perhatian utama penelitian. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah *audit delay* (AD), yaitu lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal akhir tahun anggaran hingga tanggal diterbitkannya laporan audit oleh auditor. Pengukurannya dilakukan secara kuantitatif dari tanggal berakhirnya tahun buku pemerintah daerah (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan audit oleh BPK.

3.1.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini Antara lain:

- 1) Penggunaan Aplikasi SIKD (SIKD), pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan keuangannya diberi kode (1) sedangkan pemerintah daerah yang tidak diberi kode (0)
- 2) Ukuran Pemerintah Daerah (LogAPBD), dinyatakan dengan ukuran kuantitatif yaitu total realisasi pendapatan dan belanja yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah pada tahun bersangkutan kemudian ditransformasi ke logaritma 10.
- 3) Pengalaman Menerapkan SAP (Pengalaman), dinyatakan secara kuantitatif jumlah tahun pemerintah daerah menerbitkan laporan keuangan yang diukur

dari tahun diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2005 atau setahun setelah pemerintah daerah terbentuk (untuk pemerintah daerah yang dibentuk setelah tahun 2005) sampai dengan tahun sampel penelitian.

- 4) Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah (RasioPTP), dinyatakan dengan rasio jumlah realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah daerah terhadap total realisasi pendapatan daerah yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah pada tahun bersangkutan.
- 5) Terpilihnya kembali kepala daerah periode sebelumnya (Petahana), apabila kepala daerah pada tahun yang bersangkutan menjabat pada periode kedua sebagai kepala daerah diberi kode (1), sedangkan apabila pada tahun bersangkutan kepala daerah menjabat pada periode pertama diberi kode (0).
- 6) Jumlah temuan audit (Temuan), diukur secara kuantitatif jumlah temuan audit yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah tahun anggaran bersangkutan oleh BPK.
- 7) Opini Audit (Opini), berupa jenis opini yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang tercantum dalam LHP BPK. apabila opini BPK adalah WTP diberi kode (0), sedangkan apabila opini WDP diberi kode (1), opini TW diberi kode (2) dan opini TMP diberi kode (3).

3.2 Populasi Dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia sampai dengan tahun 2011 yaitu sebanyak 497 pemerintah kabupaten/kota.

3.2.2 Sampel

Penentuan Sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pengambilan sampel acak berstrata cara proporsional (*proportional stratified random sampling*). Ukuran sampel ditentukan dengan tabel sampel Krejcie dan Morgan sesuai pada buku *Research Methods For Business* karangan Uma Sekaran.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 dari BPK.
2. Daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dan 2009 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisa dokumen. Ringkasan sumber data masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Sumber data masing-masing Variabel penelitian

Variabel Penelitian	Sumber data
<i>Audit delay</i> (AD)	LHP BPK
Penggunaan aplikasi SIKD (SIPKD)	LHP BPK

Variabel Penelitian	Sumber data
Ukuran pemerintah daerah (LogAPBD)	Laporan keuangan pemerintah daerah dalam LHP BPK
Pengalaman Menerapkan SAP (Pengalaman)	Laporan keuangan pemerintah daerah dalam LHP BPK
Tingkat ketergantungan (RasioPTP)	Laporan keuangan pemerintah daerah dalam LHP BPK
Terpilihnya kembali kepala daerah periode sebelumnya (Petahana)	Daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Kemendagri
Jumlah Temuan Audit (Temuan)	LHP BPK
Opini Audit (Opini)	LHP BPK

Sumber: data yang diolah

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu *Audit Delay* (AD), Total Realisasi APBD (LogAPBD), Pengalaman, Tingkat Ketergantungan terhadap bantuan keuangan pemerintah pusat (RasioPTP), Penggunaan Aplikasi SIPKD (SIKD), Terpilihnya kembali Kepala Daerah sebelumnya (Petahana), Jumlah Temuan Audit (Temuan), dan Opini Audit (Opini). Selain itu, dilakukan analisis tabulasi silang untuk mengetahui ada/tidaknya hubungan antara variabel dependen (AD) dengan masing-masing variabel independen. Pada penelitian ini, analisis deskriptif menggunakan output aplikasi SPSS 21.

3.5.2 Analisis Hipotesis

3.5.2.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah prasyarat yang harus dipenuhi dalam melakukan regresi linear. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 21 dan EViews 8.

1. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Normalitas dideteksi dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan melihat nilai signifikan residualnya. Data terdistribusi normal apabila nilai Kolmogorov-Smirnov memiliki tingkat signifikansi di atas 0,05 (Wibowo 2012, h.72).

2. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinieritas terjadi apabila terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011).

Pengujian terhadap multikolinieritas dideteksi dengan menggunakan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinieritas (Ghozali 2011, h.106).

3. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan antara varians dari satu residual pengamatan dengan varians dari satu residual pengamatan lainnya. Kata lain, uji heteroskedastisitas untuk melihat penyebaran data penelitian. Suatu model regresi yang baik apabila data penelitian homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2011, h.139). Metode yang dipakai untuk menguji bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas adalah uji Glejser. Kriteria data tidak terdapat heteroskedastisitas apabila variabel independen yang diregresikan terhadap

nilai absolut residual memiliki probabilitas yang tidak signifikan (Ghozali 2011, h.143).

3.5.2.2 Analisis Model

1. Persamaan Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi berganda. Model analisis regresi yang digunakan dalam penelitian adalah:

$$AD = \alpha + \beta_1 SIKD + \beta_2 \text{LogAPBD} + \beta_3 \text{Pengalaman} + \beta_4 \text{RasioPTP} \\ + \beta_5 \text{Petahana} + \beta_6 \text{Temuan} + \beta_7 \text{Opini} + e$$

Keterangan:

AD = *Audit delay* (lamanya hari penyelesaian audit)

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

LogAPBD = Logaritma dari total realisasi APBD (Pendapatan + Belanja) dalam LRA TA 2010.

Pengalaman = Pengalaman pemerintah menerbitkan laporan keuangan dalam tahun.

RasioPTP = Rasio antara total pendapatan transfer pemerintah pusat dengan total pendapatan daerah dalam persen.

SIKD = Penggunaan aplikasi SIKD

Petahana = Terpilihnya kembali kepala daerah periode sebelumnya

Temuan = Jumlah temuan audit dalam LHP BPK

Opini = Jenis opini yang diberikan oleh BPK

e = Residual (standar error)

2. Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila F hitung lebih besar daripada F tabel ($F_{hitung} > F_{tabel}$), maka semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

3. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali 2011, h.97). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol (0) sampai dengan satu (1). Apabila nilai R^2 semakin mendekati satu, maka variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai R^2 , maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas.

3.5.2.3 Analisis Hipotesis

1. Uji Statistik t

Uji statistik t (*t-test*) pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan Antara nilai t hitung dengan t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel, maka variabel independen yang diuji secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali 2011, h.98).

2. Pembahasan Hipotesis

Pembahasan hipotesis menguraikan hasil pengujian hipotesis yang telah diajukan pada bab II. Pembahasan didasarkan pada hasil pengujian uji statistik t (t -test) pada subbab sebelumnya.